

PENULISAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK BERDASARKAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011-2031



**Diajukan oleh :
Arista Putri Wijayanti**

NPM	: 170512810
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU
PUBLIK BERDASARKAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011-2031**



**Diajukan oleh :
Arista Putri Wijayanti**

NPM	: 170512810
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 28 Desember 2020

Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum Tanda tangan :

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU
PUBLIK BERDASARKAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011-2031**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 13 Februari 2021
Tempat : Online

Susunan Tim Penguji

Ketua : Hari Supriyanto, S.H., M.Hum
Sekretaris : Maria Hutapea S.H., M.Hum
Anggota : Dr. D. Krisnantoro, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum

HALAMAN MOTTO.

(Yesaya 41:10)

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu: Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.”

(Princess Hour)

“Kosongkanlah genggamamu jika ingin menggenggam sesuatu”
Jika masih ada sesuatu dalam genggam, maka pasti tak akan bisa menggenggam lagi. Bila memaksakan untuk menggenggam sekaligus, yang ada justru akan kehilangan semuanya karena tangan tak akan cukup. Pesannya adalah untuk focus pada satu hal yang benar-benar menjadi prioritas

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkati, melindungi dan menyertai saya dimanapun dan kapanpun saya berada.
2. Untuk ayah dan emihku tercinta yang senantiasa memberikan doa, semangat, serta dukungan dan kepercayaan.
3. Untuk om dan tante yang selalu menanyakan kabar skripsi, dan membantu informasi – informasi yang berkaitan dengan skripsi sehingga skripsi yang saya buat terbantu.
4. Untuk teman teman seangkatan dan seperjangan yang bersedia membantu penulisan skripsi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
5. Serta semua yang turut membantu proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat, rahmat, hikmat, dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PERDA Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Penulis telah berusaha secara maksimal untuk mengatasinya dengan tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin. mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai sampai dengan hari ini.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis sehingga skripsi dapat selsai dengan lancar.
4. Ibu Maria Hutapea S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum. selaku Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan dan saran bagi penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah mengajar dan membimbing penulis dalam proses pembelajaran sampai pada penyusunan skripsi.
6. Para Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, Penjaga Parkir, Satpam, OB, yang selalu membantu mengurus administrasi perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Orang tua, keluarga, terkhusus ayah dan emih yang selalu setia mendoakan, memberi semangat, kasih sayang, dan kesabaran kepada saya.
8. Bapak Iwantriteny Setyadi, ST, MT selaku kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah BAPPEDA Kota Magelang dan Ibu Siti Atun, SE selaku Ka. Sub Bid. Pertanian dan Lingkungan Hidup BAPPEDA Kota Magelang serta semua pegawai Badan Perencanaan Pembangunan (BAPEDDA) Kota Magelang yang membantu proses penelitian skripsi ini
9. Bapak Adi Setya Kurniawan, S.T., M.T. selaku Kasie Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang pada DPUPR Kota Magelang dan Ibu Rina Nur Aprillia, S.T., Kasie Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas DPUPR Kota Magelang, Bapak Nanang Kurniawan, ST., M.T. selaku Kasie Pengawasan & Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada DPUPR Kota Magelang , Bapak Arief Pribadi , S.T selaku Kasie Pembinaan dan Pengaturan pada DPUPR Kota Magelang serta semua

- pegawai dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Magelang yang membantu proses penelitian skripsi ini
10. Ibu Yetty Setyaningsih SP, M.Eng selaku Kabid Pengelolaan PJU, Pertamanan dan Pemakaman serta semua pegawai dan staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang (DLH) yang membantu proses penelitian skripsi ini.
11. Sahabat saya Carrissa Mehita Bella dan pacar saya Kevin Alexander yang selalu mendukung saya dan selalu mengingatkan skripsi saya serta memberikan masukan dan cinta kasih.
12. Teman – teman saya yang membantu saya Natasya, Kak Siswantia, Bang Niel, Bang Doni, Valen, Maudy.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Yogyakarta 26 Oktober 2020

Penulis



Arista Putri Wijayanti

ABSTRACT

Green open space is the most important part in urban spatial planning. Considering that the area of a city that cannot be expanded, the use of space must be optimized. The purpose of this study is to discover about the implementation of the provision of green open space along with the obstacles faced by the government in implementing green open space provision. This research is a type of juridical empirical legal research that is descriptive character, by taking the location in Magelang City. The type of data used is primary data obtained through interviews with sources and secondary data obtained by literature study. Magelang City's green open space is still at a presentation of 16.3% or where ideally public green open space is 20% whereas for private green open space it is 19.11%. It conclude that Magelang City has reached the ideal minimum amount of private green open space, which is 10%. There are still several obstacles in the implementation of providing green open space in Magelang City. Therefore, the government is trying to increase the area of green open space that is still lacking with various strategies and development directions.

Keywords: Space, Green Open, Proportion, Magelang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep	15
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan Skripsi	21
BAB II : PEMBAHASAN	
A. Tinjauan tentang Penataan Ruang	

1. Pengertian Penataan Ruang	23
2. Asas Penataan Ruang	24
3. Tujuan Penataan Ruang	25
B. Tinjauan tentang Ruang Terbuka Hijau	
1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau.....	26
2. Tujuan Ruang Terbuka Hijau	28
3. Fungsi Ruang Terbuka Hijau.....	30
4. Manfaat Ruang Terbuka Hijau	35
C. Tinjauan tentang PERDA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PERDA Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031	37
D. Hasil Penelitian.....	
1. Profil Kota Magelang.....	43
2. Implementasi Ketentuan Ruang Terbuka Hijau Publik oleh Pemerintah Kota Magelang	44
3. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kondisi Ruang Terbuka Hijau Kota Magelang ..	73
 BAB III : PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tabel 2 Eksiting RTH Publik Kota Magelang

Tabel 3 Perencanaan Penambahan RTH Publik Kota Magelang

Tabel 4 Luas Fasilitas RTH Perkotaan Kota Magelang



DAFTAR GAMBAR

**Gambar 1 Info Grafis Zoning Pemeliharaan taman di area Kecamatan
Magelang Selatan**

**Gambar 2 Info Grafis Zoning Pemeliharaan taman di area Kecamatan
Magelang Tengah**

**Gambar 3 Info Grafis Zoning Pemeliharaan taman di area Kecamatan
Magelang Utara**

Gambar 4 Taman Lansia

Gambar 5 Taman Lansia

Gambar 6 Lapangan RINDAM

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Desember 2020

Yang menyatakan



Arista Putri Wijayanti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan karena keduanya mempunyai hubungan timbal balik dan saling membutuhkan.¹ Pada dasarnya manusia akan selalu berinteraksi dengan lingkungan dimana manusia itu berada. Sebagaimana diketahui, lingkungan merupakan tempat dimana keberlangsungan semua makhluk hidup maka sudah seharusnya manusia harus menjaga keserasian, keselarasan, dan keseimbangan agar tidak menjadi rusak dan mengancam kehidupan manusia. Penduduk yang semakin hari semakin bertambah yang membuat kebutuhan ruang akan semakin banyak dan tidak sebanding dengan luasnya wilayah Indonesia. Perkembangan tersebut menuntut agar tersedianya ruang yang memadai bagi setiap orang untuk berinteraksi dan beraktifitas yang harus mengacu kepada suatu perencanaan strategis .² Perencanaan atau konsep tata ruang yang sering disebut *master plan* menjadi sebuah keharusan khususnya dibeberapa perkotaan tertentu karena dengan seiring berkembangnya jumlah penduduk maka kebutuhan terhadap ruang juga akan semakin bertambah.³ Maka konsep kebutuhan

¹ Odum, E.P., 1971, *Fundamental of Ecology*. W.B. Saunders Company, Philadelphia

² Muhammad Fahril Hasanuddin, 2017, *Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Baubau*, Universitas Hasanuddin, hlm. 21

³ Ridwan, Juniarso dkk, 2013, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa , Bandung, hlm. 25

ruang terbuka hijau publik juga menjadi kunci sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan tata ruang sebuah perkotaan sehingga masalah – masalah yang timbul yang diakibatkan dari hasil pembangunan tersebut dapat diminimalisir lebih awal.

Perkembangan masyarakat yang bertumbuh dengan pesat dan akan terus meningkat dari waktu ke waktu memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang dimana hal tersebut berkaitan dengan sempitnya ruang untuk bergerak. Hal ini bisa diartikan bahwa kawasan kota juga memiliki sifat yang sangat mempengaruhi kehidupan tempatnya⁴. Kota sebagai pusat pertumbuhan, perkembangan dan perubahan dari berbagai sektor (ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan)⁵ perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan fasilitas umum, sosial, serta ruang terbuka hijau dan penyediaan kawasan hunian. Maka dari itu perlu aturan – aturan yang bersifat mengikat dari pemerintah sebagai bentuk menjaga keselarasan pemanfaatan ruang di sebuah perkotaan.

Pada dasarnya konsep penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

⁶Untuk mendukung terpenuhinya arah pembangunan bangsa, terutama dari

⁴ Markus Zahnd, 2006, *Perancangan Kota secara terpadu Teori perancangan kota dan penerapannya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 1

⁵ Muhammad Randhy Akbar dkk, 2019, “Good Urban Governance dalam Pembangunan Ruko Bumi Tamalanrea Permai Di Kota Makasar”, Journal MODERAT, Volume 5, Nomor 1, 1/Februari/2019, Universitas Muhammadiyah Makasar, hlm. 97

⁶ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2007/26TAHUN2007UU.HTM> , Pasal 3 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diakses pada 22 September 2020, Pukul 22.50 WIB

aspek pembangunan yang berkaitan dengan ruang perlu adanya peraturan lebih khusus mengenai penataan ruang. Konsep dasar hukum penataan ruang bisa kita lihat dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 yang menyatakan bahwa :⁷

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “

Selain Pembukaan UUD 1945 alenia ke 4, ada pula pasal lainnya yang menyatakan mengenai posisi rakyat sebagai substansial(utama) dimana Bumi dan air dan kekayaan alam (BARAKA) yang dikuasai oleh negara akan dipergunakan lagi untuk kemakmuran rakyat. Hal ini diatur dalam Pasal. 33 ayat (3) UUD 1945 amandemen keempat, menyatakan bahwa :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

⁷ Alfalah Sobri, 2018, Analisis tentang Penerapan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2031, Skripsi, Fakultas hukum, Universitas Sriwijaya, hlm. 4

Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945, negara mempunyai hak untuk mempergunakan, menyelenggarakan peruntukan BARAKA tetapi negara tidak mempunyai hak mutlak atas BARAKA tersebut. BARAKA yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasi oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari negara memberi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang dimana pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang diatur juga dalam pasal 14 UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pembangunan di wilayah perkotaan yang terus meningkat sering dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat terhadap ruang juga semakin bertambah, akan berimbas pada penurunan kualitas lingkungan. Oleh sebab itu diperlukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang cukup pada suatu wilayah perkotaan. RTH pada wilayah perkotaan juga akan meningkatkan produksi oksigen dan menyerap karbon dioksida⁸ selain itu banyak lagi keuntungan yang didapat apabila sebuah perkotaan mempunyai RTH yang cukup. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 29 UU No. 26 Tahun 2007, secara khusus perlunya penyediaan dan pemanfaatan RTH yang dimana proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit adalah 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota⁹, yang terdiri dari 20% (dua puluh persen) disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih menjamin pencapaiannya sehingga diharapkan pemanfaatannya bisa dirasakan. Hal inilah yang belum terpenuhi di beberapa kota di Indonesia. Salah satunya ialah Kota Magelang.

⁸ M.Chusnan Aprianto, Sudibyakto, 2010, “ Kajian Luas Hutan Kota Berdasarkan Kebutuhan Oksigen, Karbon Tersimpan, dan Kebutuhan Air di Kota Yogyakarta”, Jpurnal MGI Vol. 21, No 2, September 2010 (12-29), Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Hlm. 95

⁹ Ernawati, 2019, Studi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Udayana Kota Mataram, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Muhammadiyah Mataram, hlm. 2

Agar didalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah atau hambatan perlu adanya perizinan rencana tata ruang yang jelas. Rencana tata ruang yang sudah sesuai dengan standar operasional merupakan sarana pengendalian perkembangan fisik didalam pelaksanaan Penataan Ruang, yang berarti bahwa rencana tersebut sudah berlandaskan Peraturan Daerah (PERDA).¹⁰ Untuk menjamin berjalannya rencana tata ruang maka proses penyiapan, penyusunan dan pelaksanaannya tidak lepas dari dukungan dari pemerintah maupun partisipasi dari masyarakat.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031, merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah guna mencapai tujuan Pembangunan Nasional dan Daerah yang lebih baik khususnya untuk mencapai RTH Publik dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan buatan. Pada huruf b ayat (2) Pasal 12 yang menyatakan bahwa salah satu strategi pengembangan Kawasan lindung untuk pemeliharaan dan peningkatan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu mewujudkan RTH untuk mencapai luasan 30% (tiga puluh persen) dari luasan daerah. Pertumbuhan penduduk Kota Magelang yang semakin bertambah tidak menambah luasan dari wilayah perkotaan itu sendiri, sehingga

¹⁰ Alfalah Sobri, 2018, Analisis tentang Penerapan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2031, Skripsi, Fakultas hukum, Universitas Sriwijaya, hlm. 7

menimbulkan pertanyaan apakah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Magelang sudah memenuhi proporsi yang sesuai dengan yang di atur dalam Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ? dimana lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011 – 2031 Di Kota Magelang. Yang sudah diperbaharui dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PERDA Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031.

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Implementasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PERDA Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas PERDA Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031

2. Hambatan - hambatan apa saja yang terjadi dalam penyediaan RTH di Kota magelang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan didalam latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi yang berkaitan dengan proporsi Ruang Terbuka Hijau khususnya Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Magelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 yang telah diperbaharui oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031
2. Untuk mengetahui hambatan.- hambatan dalam penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah dan berguna dalam perkembangan pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya yang berfokus pada kajian pengelolaan RTH Publik di wilayah perkotaan

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat yang ditunjukan pada pihak-pihak yang terkait, yaitu :

a. Pemerintah

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta masukan kepada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang serta dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan RTH Publik di Kawasan perkotaan sehingga hambatan hambatan dalam penyediaan RTH di Kota Magelang juga dapat teratasi.

b. Masyarakat

Melalui hasil penelitian ini diharapkan masyarakat sebagai pendukung pemerintah sadar bahwasannya RTH hadir sebagai sebuah kebutuhan utama bagi masyarakat di wilayah perkotaan yang setiap harinya dipenuhi oleh aktivitas rutin. Maka dari itu, selaku masyarakat diharapkan mampu menjaga keselarasan ekosistem wilayah perkotaan, dan lebih peduli.

c. Penulis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap penulis sendiri agar dapat menambah wawasan yang lebih luas mengenai ilmu hukum khususnya dibidang yang berfokus pada Ruang Terbuka Hijau (RTH).

E. Keaslian Penelitian

Penulisan yang berjudul Implementasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PERDA Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 merupakan hasil karya penulis dan bukan merupakan plagiasi. Hal ini dapat dibuktikan melalui adanya tema yang sama yang ditemukan penulis, namun tidak memiliki subjek permasalahan yang sama. Adapun skripsi yang dijadikan pembandingan oleh penulis antara lain :

1. Judul Skripsi

Tingkat ketersediaan Ruang Terbuka Hijau publik di Kota Kudus

a. Identitas Penulis

Nama Penulis : Achmad Mukafi

NPM : 5101408005

Universitas : Universitas Negeri Semarang

b. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Berapa luasan Ruang Terbuka Hijau publik di Kota Kudus sesuai dengan tuntutan Undang – Undang No.26 Tahun 2007 ?
- 2) Apa sajakah potensi Ruang Terbuka Hijau publik yang tersedia di Kota Kudus ?

c. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan kesimpulan dari hasil penelitian adalah Luas RTH Publik eksiting di wilayah Kota Kudus berdasarkan hasil identifikasi data sekunder adalah kurang lebih 76,15 hektar (0,74% dari wilayah Kota Kudus). Sedangkan hasil dari identifikasi di lapangan luas RTH publik di Kota Kudus adalah kurang lebih 286,41 Ha atau sebesar 2,83% dari luas wilayah Kota Kudus. Masih banyak RTH potensial yang belum maksimal dalam pemanfaatannya. Beberapa potensi RTH diantaranya adalah taman kota, jika bisa dimaksimalkan akan berguna dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Jalur Hijau hanya ada pada jalur utama kota, dan untuk memaksimalkan potensi jalur hijau yaitu dengan cara mengadakan penghijauan di jalur-jalur sekunder. Untuk hutan kota, lapangan olahraga dan pemakaman perlu aanya investarisasi dari dinas terkait akag data yang ada pada dinas terkait tidak jauh berbeda dengan kondisi di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan seperti diatas, maka perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis tidak meneliti secara khusus luasan RTH di Kota Magelang, tetapi menganalisis apakah proporsi Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang sudah tercukupi atau belum. Selain itu penulis akan meneliti hambatan-hambatan yang terjadi sehingga potensi yang seharusnya bisa dicapai oleh Kota Magelang bisa dijadikan acuan kebijakan pemerintah/ acuan kebijakan mengenai RTH agar lebih baik dan lebih memadai.

2. Judul Skripsi

Analisis ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Serang tahun 2000-2015

a. Identitas Penulis

Nama Penulis : Alikha Fitriyani Wulandari

NPM : 1113015000028

Universitas : Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana perubahan Ruang Terbuka Hijau di Kota Serang dalam kurun waktu Tahun 2000-2015 ?
- 2) Berapa kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Serang berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, kebutuhan

oksigen dan proyeksi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan jumlah penduduk pada Tahun 2035?

c. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan kesimpulan dari hasil penelitian adalah Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Serang pada Tahun 2000 diketahui yaitu seluas 11.840 ha. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau mengalami penurunan dalam kurun waktu 15 tahun. Berdasarkan hasil analisi yang telah dilakukan jumlah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Serang pada tahun 2015 yaitu seluas 8.165 ha. Hal ini berarti Kota Serang telah memenuhi standar kebutuhan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan luas wilayah. Namun persebaran ruang terbuka hijau belum merata disemua kecamatan. Pada tahun 2035 proyeksi Ruang Terbuka Hijau dibutuhkan seluas 1.876,2 ha dimana pada saat ini Ruang Terbuka Hijau dapat memenuhi kebutuhan ruang berdasarkan jumlah penduduk untuk tahun 2035.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan seperti diatas, maka perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis tidak meneliti atau tidak menganalisis perubahan Ruang Terbuka Hijau. Penulis memilih meneliti implementasi yang dikhususkan terhadap suatu produk hukum yang mengatur Ruang Terbuka Hijau apakah sudah sesuai seperti yang diamanatkan dalam Peraturan yang terkait dan apakah dalam

proses pengelolaan berkelanjutan mengenai Ruang Terbuka Hijau ini mengalami hambatan lalu penulis akan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

3. Judul Skripsi

Analisis tata kelola Ruang Terbuka Hijau terhadap pembangunan kota di Kabupaten Majene.

a. Identitas Penulis

Nama Penulis : Randi Ruslan

NPM : E12112009

Universitas : Universitas Hasanudin, Makassar

b. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pelaksanaan tata kelola ruang terbuka hijau dalam pembangunan kota di Kabupaten Majene ?
- 2) Bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Manjene ?

c. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas adalah Pelaksanaan tata kelola Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Majene bersifat Swakelola dan jadi tanggung jawab Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi RTH sesuai dengan kriteria dan jenis Ruang Terbuka Hijau. Peran pemerintah dalam

mengelola RTH di Kabupaten Majene sudah sesuai dengan aturan dan wewenang pemerintah daerah dalam penataan ruang mengenai RTH. Rencana penyediaan RTH diharapkan mampu memulihkan ekosistem di perkotaan yang dimana alam penyediannya disesuaikan dengan konsep rencana pengembangan.

Berdasarkan hasil penelitian kesimpulan seperti diatas, maka perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pembahasan oleh penulis akan di fokuskan pada pemenuhan RTH Kota Magelang berdasarkan PERDA Kota Magelang dan pembahasan mengenai hambatan pengelolaan RTH Kota Magelang dari segi kebijakan RTH maupun peran masyarakat dalam membantu pemerintah mengelola RTH.

F. Batasan Konsep

Dalam melakukan penelitian dan pembahasan mengenai penulisan hukum ini, penulis membatasi konsep masalah dengan melakukan peninjauan terhadap :

1. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan terhadap rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang)
2. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Menurut Pasal 1 angka 31 dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)

3. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah RTH yang berada pada lahan-lahan publik yang dikuasai oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. (Menurut Pasal 1 angka 7 dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengendalian Ruang Terbuka Hijau)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian Empiris ini dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data primer yang didukung oleh data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, data yang digunakan adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan oleh peneliti¹¹. Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Magelang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti antara lain :

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria
- c) Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- e) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

¹¹ Sumardi Suryabrata, 1983. *Metode Penelitian, Rajawali*, Jakarta, hlm. 93

- f) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
 - g) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2012-2031.
 - h) PERDA Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PERDA Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memiliki hubungan erat yang terkait dengan pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau guna membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang terdiri atas doktrin, buku, hasil, hasil penelitian, artikel, internet dan sebagainya yang kaitannya dengan pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau.
- 3) Cara pengumpulan data dilakukan melalui :
- a) Wawancara
- Wawancara merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara mengenai susunan pernyataan yang telah disiapkan oleh penulis dengan sebaik-

baiknya. Wawancara dilakukan kepada Narasumber yang berkaitan dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Magelang.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan salah satu cara untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan data-data yang berasal dari artikel, buku, dan sumber-sumber lainnya yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan yang berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah. Kota Magelang yang mempunyai City Branding “Magelang Kota Sejuta Bunga”. Secara geografis Kota Magelang terletak pada $110^{\circ}12'30''$ - $110^{\circ}12'52''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}26'28''$ - $7^{\circ}30'9''$ Lintang Selatan .¹²Kota ini terletak di tengah Kabupaten Magelang dimana Kota ini memiliki posisi strategis, karena berada di jalur utama Semarang Yogyakarta. Kota Magelang berada di 75 km sebelah Selatan Kota Semarang dan 43km sebelah utara Yogyakarta. Luas area

¹² Pemerintah Kota Magelang, Kondisi Geografis Kota Magelang, <http://www.magelangkota.go.id/direktori/content/23/kondisi-geografis->, diakses 10 Oktober 2020, pukul 14.03 WIB

Kota Magelang 1.854 Ha (18,54 km²) yang terbagi atas 3 kecamatan dan 17 kelurahan.

4. Narasumber

Narasumber adalah subyek/seseorang yang berkapasitas sebagai ahli/professional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan rumusan maslaah hukum dan tujuan penelitian. Narasumber penelitian ini adalah :

- a. Bapak Iwantriteny Setyadi, ST, MT selaku kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah BAPPEDA Kota Magelang.
- b. Ibu Siti Atun, SE selaku Ka. Sub Bid. Pertanian dan Lingkungan Hidup BAPPEDA Kota Magelang .
- c. Bapak Adi Setya Kurniawan, S.T., M.T. selaku Kasie Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang pada DPUPR Kota Magelang.
- d. Ibu Rina Nur Aprillia, S.T., Kasie Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas DPUPR Kota Magelang.
- e. Bapak Nanang Kurniawan, ST., M.T. selaku Kasie Pengawasan & Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada DPUPR Kota Magelang.
- f. Bapak Arief Pribadi , S.T selaku Kasie Pembinaan dan Pengaturan pada DPUPR Kota Magelang.

- g. Ibu Yetty Setyaningsih SP, M.Eng selaku Kabid Pengelolaan PJU, Pertamanan dan Pemakaman.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data-data yang dikumpulkan secara sistematis dan terstruktur sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai keadaan yang diteliti.¹³ Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif dalam pemaparannya dengan cara menjelaskan secara logis dan sistematis mengenai data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan dikaitkan dengan obyek penelitian

Metode berpikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berpikir induktif yang proses berpikir dari hal hal yang khusus berdasarkan maka ditarik kesimpulan yang bersifat umum..¹⁴

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi :

BAB I : PENDAHULUAN

¹³ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 29

¹⁴ *ibid*

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab pembahasan ini memuat kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang, serta perencanaan yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang untuk memenuhi Ruang Terbuka Hijau yang masih kurang maksimal dengan berpedoman pada PERDA Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 di Kota Magelang yang telah di perbaharui oleh PERDA Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PERDA Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031, serta pembahasan mengenai hambatan – hambatan yang dirasakan dalam penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Magelang.

BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi uraian yang berkaitan dengan BAB II. Saran merupakan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah di uraikan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2020 Tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai perencanaan makro, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Magelang sebagai lingkup perencanaan mikro RTRTW, dan pihak pelaksana RTH Publik yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Kota Magelang masih berada pada presentasi 16,3% atau dimana idealnya RTH publik sebesar 20% sedangkan untuk RTH privat di presentase 19,11% dimana Kota Magelang sudah mencapai jumlah minimal ideal RTH privat yaitu 10%.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pemerintah Kota Magelang sudah mempunyai arahan sampai akhir tahun rencana dengan proposi

yaitu RTH Publik dengan total luas paling rendah sebesar kurang lebih 371 ha (tiga ratus tujuh puluh satu hektar). RTH Publik akan dikembangkan secara bertahap oleh Pemerintah daerah dan tersebar di seluruh wilayah daerah. Dari kondisi RTH eksisting yang ada, di Kota Magelang terdapat kekurangan RTH publik seluas ± 71 Ha.

2. Hambatan yang dihadapi dalam penyediaan ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang adalah sebagai berikut :
 - a. Keterbatasan lahan atau kurangnya lahan di kawasan perkotaan.
 - b. Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Magelang harus bisa lebih memaksimalkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik di kecamatan-kecamatan yang penduduknya masih rendah agar dapat menambah luasan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Magelang sesuai dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031.

2. Perlunya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup khususnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang cukup, sehingga Pemerintah Kota Magelang harus lebih aktif mengadakan sosialisasi arti pentingnya Ruang Terbuka Hijau bagi sebuah lingkungan dalam masyarakat



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Muhammad Fahril Hasanuddin, 2017, *Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Baubau*, Universitas Hasanuddin
- Ridwan, Juniarso dkk, 2013, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa , Bandung
- Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, 2011, *RTH 30%! Revolusi (Kota) Hijau*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Eko Budiarjo, Djoko sujarto, 2009, *Kota Berkelanjutan (Sustainable City)*, P.T. ALUMNI, Bandung
- Markus Zahnd, 2006, *Perancangan Kota secara terpadu Teori perancangan kota dan penerapannya*, Kanisius, Yogyakarta
- Sumardi Suryabrata, 1983. *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, hlm. 93
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 29
- Hidayah, Retna, 2012, *Tata Bangunan dan Lingkungan*, PPS UNY, Yogyakarta
- Hadi Sabari Yunus, 2012. *Manajemen kota: Perspektif Spasial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 102
- The Liang Gie, 2010, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta
- Hotma P. Sibuca, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, 2016, *Hukum Tata Ruang*, Nuasa, Bandung, hlm 24

JURNAL / MAJALAH

Samsudi, 2020, "Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta", Journal of rural and development, Volume 1/01/Februari/2020, Universitas Sebelas Maret, hlm. 15

Muhammad Randhy Akbar dkk, 2019, "Good Urban Governance dalam Pembangunan Ruko Bumi Tamalanrea Permai Di Kota Makasar", Journal MODERAT, Volume 5, Nomor 1, 1/Februari/2019, Universitas Muhammadiyah Makasar, hlm. 97

M.Chusnan Aprianto, Sudibyakto, 2010, " Kajian Luas Hutan Kota Berdasarkan Kebutuhan Oksigen, Karbon Tersimpan, dan Kebutuhan Air di Kota Yogyakarta", Jpurnal MGI Vol. 21, No 2, September 2010 (12-29), Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Hlm. 95

Odum, E.P., 1971, Fundamental of Ecology. W.B. Saunders Company, philadelpihia

N. Imansari, and P. Khadiyanta, 2015 "Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menurut Preferensi Masyarakat di Kawasan Pusat Kota Tangerang," Ruang, vol. 1, no. 3, pp. 101-110, Jul. 2015, Universitas Diponegoro Semarang

TESIS / DISERTASI

Anang Saputro, 2012, *Implentasi Ketentuan Ruang terbuka Hijau oleh Pemerintah Kota Surakarta*, Skripsi, Fakultas Hukun, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Alfalah Sobri, 2018, *Analisis tentang Penerapan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang Berdasaekan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Korta Palembang Tahun 2012-2032*, Skripsi, Fakultas hukum, Universitas Sriwijaya, hlm. 4

Ernawati, 2019, *Studi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Udayana Kota Mataram*, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Muhammadiyah Mataram, hlm. 2

Purnomohadi, S, 1995. *“Peran Ruang Terbuka Hijau Dalam Pengendalian Kualitas Udara di DKI Jakarta”*. Disertasi, Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725))

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

INTERNET

Pemerintah Kota Magelang, Kondisi Geografis Kota Magelang, <http://www.magelangkota.go.id/direktori/content/23/kondisi-geografis->, diakses 10 Oktober 2020, Pukul 14.03 WIB

Dwihatmojo, Roswidyatmoko, 2010, “Ruang Terbuka Hijau yang Semakin Terpinggirkan.”[https://www.academia.edu/32512448/RUANG TERBUKA HIJAU YANG SEMAKIN TERPINGGIRKAN](https://www.academia.edu/32512448/RUANG_TERBUKA_HIJAU_YANG_SEMAKIN_TERPINGGIRKAN), diakses pada 17 Oktober 2020, Pukul 14.18 WIB